



Journal of Human And Education
Volume 5, No. 6, Tahun 2025, pp 1-8
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Prestasi Olahraga Bulutangkis Sebagai Modal Sosial Dan Simbolik: Transformasi Identitas Dan Penerimaan Sosial Etnis Tionghoa Di Indonesia

Sarmilah Aini¹, Nahdarul Ahmadi Purba², Pujiati³

Universitas Sumatera Utara

Email: sarmilahaini@gmail.com, nahdarulapurba@gmail.com, pujiati@usu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara prestasi olahraga populer dan penerimaan sosial etnis Tionghoa di Indonesia dalam konteks kebijakan kewarganegaraan. Kajian ini berangkat dari praktik diskriminatif Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang dialami oleh etnis Tionghoa, termasuk atlet berprestasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran olahraga, khususnya bulutangkis, sebagai medium simbolik dalam mendorong integrasi sosial dan perubahan kebijakan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis sosiologis dan fokus temporal pada periode 1992–1996. Data diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan, arsip media, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi olahraga menghasilkan modal simbolik yang memperkuat legitimasi sosial etnis Tionghoa di ruang publik dan meningkatkan tekanan terhadap negara, yang berkontribusi pada penghapusan SBKRI melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996. Namun demikian, integrasi yang tercipta bersifat simbolik dan belum sepenuhnya menghapus eksklusi struktural birokrasi. Penelitian ini menegaskan peran olahraga sebagai arena penting negosiasi identitas dan kewarganegaraan.

Kata Kunci: *Etnis Tionghoa, Kewarganegaraan, Modal Simbolik, Olahraga, SBKRI.*

Abstract

This study examines the relationship between elite sporting achievements and the social acceptance of ethnic Chinese Indonesians within the framework of citizenship policy. It is motivated by the discriminatory practice of the Indonesian Citizenship Certificate (SBKRI), which affected ethnic Chinese communities, including elite athletes. The study aims to analyze how popular sport, particularly badminton, functions as a symbolic medium for social integration and policy change. Employing a qualitative historical–sociological approach, this research focuses on the period between 1992 and 1996. Data were collected through policy document analysis, media archives, and academic literature. The findings show that elite sporting success generated symbolic capital that enhanced the public legitimacy of ethnic Chinese Indonesians and increased public pressure on the state, contributing to the abolition of the SBKRI through Presidential Decree No. 56 of 1996.

However, the integration achieved remained largely symbolic and did not fully dismantle bureaucratic exclusion. This study highlights sport as a crucial arena for negotiating identity, citizenship, and national belonging in a multiethnic society.

Keywords: *Citizenship, Chinese Indonesians, SBKRI, Sport, Symbolic Capital.*

PENDAHULUAN

Etnis Tionghoa di Indonesia memiliki sejarah migrasi yang panjang dan berkelanjutan, yang dapat ditelusuri setidaknya sejak abad ke-13 melalui jaringan perdagangan maritim antara Tiongkok dan wilayah Nusantara. Migrasi awal etnis Tionghoa pada umumnya bercorak temporer, di mana para pendatang bermigrasi dengan tujuan ekonomi dan memiliki orientasi kembali ke tanah asal setelah mencapai usia lanjut. Pola migrasi ini, sebagaimana dikemukakan oleh Wang Gungwu (1996:9), menunjukkan karakter migrasi sirkuler yang kemudian mengalami transformasi menjadi pemukiman permanen akibat perubahan kondisi ekonomi dan sosial di wilayah tujuan.

Dalam konteks kolonial Hindia Belanda, etnis Tionghoa ditempatkan dalam struktur stratifikasi sosial yang hierarkis, berada di bawah golongan Eropa dan di atas kelompok pribumi. Posisi ini memberikan peran strategis bagi etnis Tionghoa sebagai kelompok perantara dalam sistem ekonomi kolonial, khususnya di sektor perdagangan, distribusi, dan keuangan. Meskipun secara ekonomi berperan signifikan dalam mendukung pembangunan kolonial, posisi tersebut tidak sepenuhnya memberikan jaminan integrasi sosial dan politik. Sebaliknya, struktur kolonial justru melanggengkan batas-batas rasial yang rigid dan memperkuat status ambigu etnis Tionghoa sebagai kelompok yang fungsional secara ekonomi, tetapi terpinggirkan secara sosial-politik.

Pasca kemerdekaan Indonesia, kontribusi etnis Tionghoa terhadap perekonomian nasional tetap berlanjut, terutama di sektor perdagangan, industri, dan kewirausahaan. Namun, kontinuitas peran ekonomi tersebut tidak diiringi oleh penerimaan sosial dan pengakuan politik yang setara. Dalam praktik kenegaraan, etnis Tionghoa menghadapi berbagai bentuk pembatasan administratif dan diskriminasi struktural, salah satunya melalui kebijakan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Pemberlakuan SBKRI secara khusus kepada warga keturunan Tionghoa dan India mencerminkan adanya diferensiasi kewarganegaraan yang bersifat eksklusif dan diskriminatif. Proses pengurusan dokumen tersebut kerap diwarnai prosedur birokrasi yang berbelit, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum serta memperkuat eksklusi sosial terhadap kelompok ini.

Fenomena diskriminasi administratif tersebut juga dialami oleh individu-individu etnis Tionghoa yang memiliki kontribusi simbolik tinggi bagi negara, termasuk atlet olahraga berprestasi. Kasus yang menonjol adalah Susi Susanti dan Alan Budikusuma, atlet bulutangkis yang meraih medali emas pada Olimpiade Barcelona 1992 dan menjadi simbol kebanggaan nasional. Meskipun prestasi mereka memperoleh legitimasi kuat dalam wacana nasionalisme olahraga, keduanya masih menghadapi kendala administratif dalam memperoleh SBKRI, meskipun pengajuan telah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Situasi ini merefleksikan adanya kontradiksi antara pengakuan simbolik terhadap kontribusi nasional dan realitas perlakuan administratif yang bersifat diskriminatif.

Persoalan tersebut mencapai titik krusial pada Olimpiade Atlanta 1996, ketika Susi Susanti secara terbuka mengungkapkan kesulitan yang dialaminya dalam pengurusan SBKRI kepada publik internasional. Pernyataan ini memicu perhatian luas dan mendorong respons politik dari pemerintah Indonesia, yang diwujudkan melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Penghapusan Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kebijakan ini secara formal mengakhiri kewajiban SBKRI. Namun demikian, implementasi

kebijakan tersebut tidak berlangsung secara seragam di tingkat lokal, terutama akibat keterbatasan sosialisasi dan lemahnya pengawasan terhadap birokrasi daerah.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa prestasi dalam olahraga populer berpotensi berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial dan mekanisme negosiasi identitas etnis dalam ruang publik. Olahraga populer yang menghasilkan prestasi pada tingkat nasional dan internasional memiliki daya jangkauan simbolik yang luas dan mampu membangun legitimasi sosial bagi atlet serta kelompok etnis yang direpresentasikannya. Dalam konteks ini, prestasi bulutangkis tidak hanya berkontribusi pada pencitraan nasional, tetapi juga menjadi bentuk modal simbolik yang dapat dikonversi menjadi modal sosial dan, dalam batas tertentu, modal politik bagi etnis Tionghoa di Indonesia.

Meskipun demikian, kajian akademik yang secara khusus mengulas hubungan antara olahraga populer dan penerimaan sosial etnis Tionghoa di Indonesia masih relatif terbatas. Literatur yang ada cenderung memusatkan perhatian pada peran etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi, baik pada masa kolonial maupun pasca kemerdekaan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh prestasi olahraga terhadap penerimaan sosial dan integrasi etnis Tionghoa menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan guna mengisi kesenjangan penelitian (research gap) dalam kajian sosiologi olahraga, etnisitas, dan kebangsaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis-sosiologis untuk menganalisis hubungan antara prestasi olahraga populer dan penerimaan sosial etnis Tionghoa di Indonesia. Olahraga diposisikan sebagai arena sosial dan simbolik yang memungkinkan terjadinya negosiasi identitas, pengakuan, dan integrasi sosial dalam konteks kebangsaan.

Penelitian difokuskan pada periode 1992–1996, yang mencakup perolehan medali emas pertama Indonesia pada Olimpiade Barcelona 1992 serta penghapusan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996. Rentang waktu ini dipilih karena merepresentasikan momen krusial keterkaitan antara prestasi olahraga, wacana publik, dan perubahan kebijakan negara.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi dokumen kebijakan kewarganegaraan, terutama Keppres No. 56 Tahun 1996, serta pernyataan publik dan pemberitaan media terkait pengalaman atlet bulutangkis Susi Susanti dan Alan Budikusuma dalam pengurusan SBKRI. Data sekunder mencakup literatur akademik berupa buku dan artikel jurnal yang membahas etnis Tionghoa di Indonesia, kebijakan kewarganegaraan, nasionalisme, serta sosiologi olahraga.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, termasuk penelusuran arsip media nasional yang merepresentasikan diskursus publik mengenai prestasi olahraga dan identitas nasional. Sumber media dipilih berdasarkan relevansinya dalam membentuk opini publik dan legitimasi simbolik pada periode penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif tematik dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi. Tema-tema utama yang dianalisis meliputi diskriminasi administratif, nasionalisme olahraga, modal simbolik, dan integrasi sosial. Analisis historis digunakan untuk menelusuri relasi temporal antara prestasi olahraga, respons publik, dan perubahan kebijakan kewarganegaraan. Kerangka analisis berpijak pada konsep modal simbolik dan pengakuan sosial, untuk menjelaskan bagaimana prestasi olahraga mengonversi pencapaian individu menjadi legitimasi sosial yang lebih luas bagi kelompok etnis.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan dokumen resmi, arsip media, dan literatur akademik, serta melalui kritik sumber untuk memastikan konsistensi historis dan konteks data. Penelitian ini dibatasi pada analisis simbolik dan kebijakan di tingkat nasional, sehingga tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi pengalaman seluruh etnis Tionghoa di Indonesia, melainkan untuk memahami peran olahraga sebagai mekanisme integrasi sosial dalam masyarakat multietnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Historis Kebijakan SBKRI

Persoalan kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia merupakan isu historis yang berakar sejak masa kolonial dan berlanjut hingga periode pasca kemerdekaan. Pada masa Hindia Belanda, penduduk diklasifikasikan secara rasial ke dalam golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Klasifikasi ini menciptakan stratifikasi sosial yang rigid dan mewariskan kategorisasi eksklusif terhadap etnis Tionghoa sebagai kelompok “Timur Asing”, suatu posisi yang ambigu: fungsional secara ekonomi, tetapi terpisah secara sosial dan politik. Warisan kategorisasi kolonial ini menjadi fondasi awal bagi problem inklusi kewarganegaraan etnis Tionghoa dalam negara-bangsa Indonesia.

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam merumuskan kebijakan kewarganegaraan bagi etnis Tionghoa, terutama terkait isu dwi-kewarganegaraan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 membuka ruang bagi warga keturunan Tionghoa untuk memilih kewarganegaraan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme tersebut menyisakan ambiguitas administratif yang berkepanjangan. Ketidakjelasan ini berdampak pada munculnya praktik pembuktian kewarganegaraan yang bersifat diskriminatif, terutama bagi mereka yang telah lama bermukim dan lahir di Indonesia.

Pada masa Orde Baru, problem kewarganegaraan etnis Tionghoa semakin mengeras seiring menguatnya pendekatan keamanan negara pasca peristiwa 1965. Dalam kerangka stabilitas politik dan kontrol ideologis, negara mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang menempatkan etnis Tionghoa dalam posisi yang selalu harus membuktikan loyalitas dan keanggotaannya sebagai warga negara. Salah satu manifestasi dari kebijakan ini adalah praktik penggunaan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Meskipun tidak memiliki dasar hukum yang eksplisit dalam undang-undang kewarganegaraan, SBKRI dipraktikkan secara luas sebagai dokumen wajib bagi warga keturunan Tionghoa dalam berbagai urusan administratif.

SBKRI pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen administratif yang melembagakan perbedaan kewarganegaraan berdasarkan garis etnis. Melalui mekanisme ini, kewarganegaraan tidak dipahami sebagai status hukum yang setara bagi seluruh warga negara, melainkan sebagai status yang harus diverifikasi secara berulang bagi kelompok tertentu. Praktik ini memperkuat stigma dan eksklusi sosial terhadap etnis Tionghoa, sekaligus mereproduksi relasi kuasa antara negara dan kelompok minoritas.

Kritik terhadap SBKRI mulai menguat pada awal 1990-an, seiring berkembangnya wacana hak asasi manusia dan meningkatnya sorotan publik terhadap praktik diskriminatif negara. Dalam konteks inilah kasus atlet bulutangkis berprestasi etnis Tionghoa menjadi relevan secara analitis. Atlet seperti Susi Susanti dan Alan Budikusuma, yang secara simbolik merepresentasikan bangsa Indonesia di arena internasional, justru mengalami hambatan administratif akibat kewajiban SBKRI. Fakta ini menyingkap paradoks integrasi nasional: pengakuan simbolik melalui prestasi tidak selalu berbanding lurus dengan pengakuan legal.

Penghapusan SBKRI melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 menandai titik balik dalam kebijakan kewarganegaraan etnis Tionghoa. Namun, keberlanjutan praktik

SBKRI di beberapa daerah setelah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kewarganegaraan tidak semata terletak pada regulasi formal, tetapi juga pada budaya birokrasi dan struktur eksklusif yang mengakar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah SBKRI menjadi prasyarat penting sebelum menganalisis peran olahraga populer sebagai medium integrasi sosial dan negosiasi identitas etnis Tionghoa di Indonesia.

Dengan demikian, sejarah penerapan SBKRI menunjukkan bahwa persoalan kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia tidak hanya bersumber pada kekosongan regulasi, tetapi terutama pada mekanisme eksklusif yang dilembagakan melalui praktik birokrasi dan wacana loyalitas kebangsaan. Meskipun penghapusan SBKRI melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 menandai koreksi penting dalam kebijakan negara, pengalaman diskriminatif yang dialami etnis Tionghoa—termasuk oleh individu-individu yang secara simbolik berkontribusi besar bagi bangsa—mengungkap keterbatasan integrasi yang berbasis hukum formal semata. Dalam konteks inilah arena non-politik, seperti olahraga populer, menjadi relevan untuk dianalisis sebagai ruang alternatif produksi pengakuan sosial. Prestasi olahraga berpotensi membentuk legitimasi simbolik yang melampaui batas administratif dan membuka ruang negosiasi identitas etnis dalam imajinasi kebangsaan. Oleh karena itu, subbab berikut akan membahas bagaimana olahraga, khususnya bulutangkis, berfungsi sebagai modal simbolik dalam meningkatkan penerimaan sosial etnis Tionghoa di Indonesia.

2. Prestasi Olahraga sebagai Modal Simbolik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prestasi bulutangkis Indonesia pada Olimpiade Barcelona 1992 beroperasi sebagai bentuk modal simbolik sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Dalam perspektif Bourdieu, modal simbolik merupakan bentuk pengakuan, kehormatan, dan legitimasi yang diakui secara kolektif dalam suatu *field*. Prestasi Susi Susanti dan Alan Budikusuma tidak hanya menghasilkan kemenangan atletik, tetapi juga membangun legitimasi simbolik yang kuat dalam arena nasionalisme dan ruang publik Indonesia.

Media massa berperan sebagai agen penting dalam mengonversi prestasi olahraga menjadi modal simbolik melalui representasi yang menempatkan atlet sebagai simbol keberhasilan bangsa. Proses ini menunjukkan bahwa olahraga berfungsi sebagai *field of cultural production* yang memungkinkan individu, termasuk dari kelompok minoritas, memperoleh posisi sosial yang relatif egaliter dibandingkan arena ekonomi dan politik yang lebih rigid. Dengan demikian, temuan ini mengonfirmasi bahwa prestasi olahraga dapat menjadi instrumen akumulasi modal simbolik bagi etnis Tionghoa, yang selama ini sering berada dalam posisi marginal secara sosial-politik.

3. Nasionalisme Olahraga dan Imajinasi Kebangsaan

Hasil analisis juga dapat dipahami melalui kerangka yang dikemukakan oleh Benedict Anderson. Dalam konteks Olimpiade, prestasi atlet diproduksi dan direproduksi sebagai narasi kolektif kebangsaan melalui media, sehingga menciptakan rasa kebersamaan yang melampaui perbedaan etnis. Kemenangan Olympic dipersepsikan sebagai keberhasilan “kita” sebagai bangsa, bukan semata pencapaian individu atau kelompok etnis tertentu.

Dalam kerangka ini, nasionalisme olahraga berfungsi sebagai mekanisme integratif yang bersifat simbolik, di mana etnis Tionghoa untuk sementara waktu dilepaskan dari kategori “minoritas” dan diintegrasikan ke dalam imaji nasional Indonesia. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan penelitian, integrasi ini bersifat kontekstual dan tidak sepenuhnya terlembagakan dalam struktur hukum dan politik negara.

4. Diskriminasi Struktural dan Batas Integrasi

Ketegangan antara pengakuan simbolik dan diskriminasi administratif terhadap etnis Tionghoa dapat dijelaskan melalui konsep stratifikasi sosial dan penutupan sosial (social

closure) yang dikemukakan oleh Max Weber. Kebijakan SBKRI berfungsi sebagai mekanisme administrasi negara yang menciptakan batas keanggotaan kewarganegaraan secara eksklusif, meskipun secara formal Indonesia menganut prinsip kesetaraan warga negara.

Temuan menunjukkan bahwa bahkan individu dengan kontribusi simbolik yang tinggi tetap menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh pengakuan kewarganegaraan penuh. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi sosial melalui olahraga belum mampu menembus mekanisme penutupan sosial yang bersifat birokratis dan institusional. Dengan kata lain, prestasi olahraga membuka ruang pengakuan simbolik, tetapi tidak secara otomatis membongkar struktur eksklusi administratif.

5. Olahraga sebagai Arena Negosiasi Kekuasaan Simbolik

Pernyataan terbuka Susi Susanti pada Olimpiade Atlanta 1996 dapat dibaca dalam kerangka hegemoni kultural ala Antonio Gramsci. Dalam kondisi normal, wacana kewarganegaraan etnis Tionghoa berada dalam posisi subordinat. Namun, legitimasi simbolik yang diperoleh melalui prestasi olahraga memungkinkan atlet berperan sebagai *counter-hegemonic actor*, yang mampu menantang narasi resmi negara di ruang publik tanpa harus menggunakan jalur politik formal.

Tekanan simbolik yang dihasilkan oleh figur atlet berprestasi memperlemah posisi hegemonik negara dalam mempertahankan kebijakan diskriminatif, sehingga memaksa negara melakukan penyesuaian melalui pencabutan SBKRI. Perubahan kebijakan ini menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi arena negosiasi kekuasaan simbolik yang efektif, meskipun bersifat episodik dan bergantung pada figur simbolik tertentu.

6. Integrasi Sosial yang Bersifat Kontingen

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa olahraga populer berperan sebagai katalis integrasi sosial, bukan sebagai mekanisme transformasi struktural yang permanen. Integrasi etnis Tionghoa melalui olahraga bersifat kontingen, bergantung pada momentum prestasi dan intensitas perhatian publik. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi simbolik tidak selalu paralel dengan integrasi institusional.

Kontruksi integrasi melalui olahraga cenderung bersifat individualistik dan elitis, menguntungkan figur-figur berprestasi, tetapi belum tentu secara langsung meningkatkan posisi sosial kelompok etnis secara kolektif. Oleh karena itu, olahraga memiliki potensi integratif yang signifikan, tetapi sekaligus memiliki keterbatasan dalam mengatasi diskriminasi yang berakar secara struktural.

7. Kontribusi Teoretis Penelitian

Dengan mengintegrasikan perspektif Bourdieu, Anderson, Weber, dan Gramsci, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian sosiologi olahraga dan etnisitas di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa olahraga tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas kultural, tetapi juga sebagai arena produksi makna, legitimasi, dan relasi kekuasaan. Penelitian ini memperluas fokus kajian etnis Tionghoa yang selama ini didominasi perspektif ekonomi, dengan menempatkan olahraga sebagai medium penting dalam proses integrasi sosial dan negosiasi kewarganegaraan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi olahraga populer, khususnya bulutangkis, memiliki peran signifikan sebagai arena simbolik dalam membentuk penerimaan sosial etnis Tionghoa di Indonesia. Melalui analisis historis-sosiologis terhadap perolehan medali emas Olimpiade 1992 dan dinamika kebijakan kewarganegaraan hingga 1996, penelitian ini menemukan bahwa prestasi olahraga mampu menghasilkan modal simbolik yang kuat, baik bagi individu atlet maupun bagi kelompok etnis yang direpresentasikannya. Modal simbolik

tersebut berperan penting dalam membangun legitimasi sosial dan memperluas ruang negosiasi identitas etnis dalam bingkai nasionalisme Indonesia.

Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan adanya kontradiksi antara pengakuan simbolik dan integrasi struktural. Meskipun prestasi olahraga mampu meningkatkan penerimaan sosial di ruang publik, diskriminasi administratif terhadap etnis Tionghoa, sebagaimana tercermin dalam praktik SBKRI, tetap bertahan hingga muncul tekanan publik yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi melalui olahraga bersifat kontingen dan tidak secara otomatis membongkar struktur eksklusif yang mengakar dalam birokrasi negara.

Perubahan kebijakan melalui penghapusan SBKRI pada tahun 1996 mengindikasikan bahwa olahraga dapat berfungsi sebagai katalis perubahan sosial dan kebijakan, terutama ketika dikombinasikan dengan legitimasi simbolik dan sorotan media. Prestasi atlet berperan sebagai medium artikulasi ketidakadilan yang efektif, karena posisinya yang terlegitimasi dalam konstruksi nasionalisme. Akan tetapi, dampak integratif olahraga cenderung bersifat individual dan episodik, sehingga tidak dapat menggantikan reformasi struktural dalam menjamin kesetaraan kewarganegaraan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian sosiologi olahraga dan etnisitas dengan menunjukkan bahwa olahraga merupakan arena produksi modal simbolik, imajinasi kebangsaan, dan negosiasi kekuasaan simbolik. Penelitian ini melampaui pendekatan ekonomi yang dominan dalam studi etnis Tionghoa di Indonesia dengan menempatkan olahraga sebagai medium penting dalam proses integrasi sosial. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji peran olahraga populer di tingkat akar rumput serta dalam konteks politik pasca Reformasi, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika integrasi etnis dalam masyarakat multietnis Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (1991). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Rev. ed.). Verso.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Polity Press.
- Brown, D. (2004). *Contemporary nationalism: Civic, ethnocultural and multicultural politics*. Routledge.
- Coakley, J. (2009). *Sports in society: Issues and controversies* (10th ed.). McGraw-Hill.
- Coppel, C. A. (2002). Studying ethnic Chinese Indonesians. *Journal of Southeast Asian Studies*, 33(3), 453–470. <https://doi.org/10.1017/S0022463402000228>
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Heryanto, A. (1998). Ethnic identities and erasure: Chinese Indonesians in public culture. *Southeast Asian Journal of Social Science*, 26(1), 95–114.
- Heryanto, A. (2006). *State terrorism and political identity in Indonesia: Fatally belonging*. Routledge.
- Honneth, A. (1995). *The struggle for recognition: The moral grammar of social conflicts* (J. Anderson, Trans.). Polity Press.
- Lutan, R. (2001). *Olahraga dan tantangan kebangsaan*. Direktorat Jenderal Olahraga.
- Reid, A. (Ed.). (1996). *Sojourners and settlers: Histories of Southeast Asia and the Chinese*. Allen & Unwin.
- Suryadinata, L. (1986). *Pribumi Indonesians, the Chinese minority and China*. Heinemann Asia.
- Suryadinata, L. (1997). *Etnis Tionghoa dan nasionalisme Indonesia*. LP3ES.

- Suryadinata, L. (2008). *Understanding ethnic relations in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Wang, G. (1996). *The Chinese overseas: From earthbound China to the quest for autonomy*. Harvard University Press.
- Wimmer, A. (2013). *Ethnic boundary making: Institutions, power, networks*. Oxford University Press.